BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

Farhan Ryandi
Analis Legislatif Ahli Pertama
farhan.ryandi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025 telah rampung pada Juni hingga Juli lalu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 3 Tahun 2025. Ketentuan seperti rombongan belajar, tata cara penghitungan daya tampung berdasarkan Data Pokok Pendidikan, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis SPMB tahun 2025 telah ditetapkan dan disosialisasikan. Namun, dalam prosesnya, berbagai dinamika dan tantangan masih ditemukan. Situasi ini muncul di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dugaan ketidaksesuaian prosedur dan data ditemukan di Banten, ketika seorang Anggota DPRD Provinsi, Yeremia Mendrofa, mengemukakan adanya dugaan kecurangan pada jalur prestasi non-akademik. Beberapa calon murid dilaporkan memiliki nilai melebihi batas maksimal 190 yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, bahkan mencapai 200. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, respons pembentukan satuan tugas khusus dilakukan oleh Wakil Gubernur untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB daring di provinsi tersebut.

Isu lain terjadi di SMAN 21 Kota Makassar, di mana 28 calon murid awalnya tidak diterima. Aliansi Masyarakat BTP di Makassar menduga adanya praktik yang tidak sesuai, seperti dugaan jual beli kursi, serta ketidaksesuaian antara data jumlah rombongan belajar yang disosialisasikan dengan realisasi penerimaan murid. Setelah serangkaian aksi dan perundingan, disepakati bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengajukan permohonan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar 28 calon murid tersebut dapat diterima di SMAN 21 Makassar. Selagi menunggu keputusan, mereka akan bersekolah sementara di SMAN 25 Kota Makassar.

Permasalahan juga muncul terkait implementasi jalur zonasi dan daya tampung sekolah. Sebagai contoh, di SMKN 2 Kabupaten Tangerang, para orang tua murid dari Desa Pisangan Jaya melayangkan protes. Mereka merasa janggal karena anak-anak mereka, yang berdomisili dekat dengan sekolah, tidak diterima melalui jalur domisili, sementara pendaftar dari wilayah yang lebih jauh justru berhasil masuk. Tercatat sekitar 92 calon murid dari Desa Pisangan Jaya tidak diterima. Ketua Panitia SPMB SMKN 2 Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa Desa Pisangan Jaya sebenarnya telah mendapatkan kuota yang lebih besar dari alokasi awal sekolah, yaitu 15,4 persen dari 10 persen.

Selain masalah seleksi yang ketat, ada juga fenomena minimnya pendaftar di beberapa sekolah. Di Klungkung, Bali, 12 SD di Kecamatan Banjarangkan dan Nusa Penida menerima murid dengan jumlah yang sangat sedikit, bahkan ada yang hanya 1 hingga 4 pendaftar. Situasi serupa terjadi di Kabupaten Sleman, di mana 52 SD, masing-masing hanya mendapatkan kurang dari 10 murid baru. Bahkan, di Ponorogo, 8 SD tidak mendapatkan murid baru sama sekali. Dinas Pendidikan Tarakan di Kalimantan Utara juga melaporkan bahwa masih ada 188 kuota murid SMP yang belum terpenuhi.

Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen pada 16 Juli 2025, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyampaikan beberapa laporan yang diterima dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat. Beliau menyoroti indikasi kecurangan yang dilaporkan meliputi pengondisian nilai rapor untuk jalur prestasi dan manipulasi titik koordinat domisili dalam aplikasi daring SPMB agar dekat dengan sekolah tujuan.

Menanggapi berbagai masukan dan dinamika di lapangan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPMB tahun 2025. Beliau menyatakan bahwa Kemendikdasmen tengah mengumpulkan data untuk dievaluasi dan akan menyampaikan hasilnya secara tertulis kepada DPR RI. Mendikdasmen juga mengimbau masyarakat yang ingin menyampaikan aduan agar melampirkan bukti dan data yang valid agar dapat ditindaklanjuti dengan baik. Secara keseluruhan, meskipun SPMB 2025 dirancang untuk mencapai transparansi dan pemerataan, masih ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki agar pengalaman serupa tidak terulang di masa mendatang.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasannya dapat berperan dalam memastikan pelaksanaan evaluasi SPMB tahun 2025 oleh Kemendikdasmen berjalan secara menyeluruh dan tepat sasaran, sehingga berbagai kendala yang muncul pada pelaksanaan tahun ini dapat diminimalkan di masa mendatang. Selain itu, Komisi X DPR RI juga dapat mendorong Kemendikdasmen untuk melakukan pembaruan kebijakan SPMB berdasarkan hasil evaluasi, guna memperluas akses pendidikan bagi seluruh calon murid baru. Dalam konteks ini, penting pula bagi Kemendikdasmen untuk memperkuat upaya pemerataan kualitas pendidikan antarsekolah, agar tidak terjadi kesenjangan persepsi antara sekolah yang dianggap "favorit" dan "non-favorit." Terkait aspek digitalisasi, Komisi X DPR RI dapat memberikan perhatian pada kesiapan infrastruktur jaringan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di daerah, guna mendukung pelaksanaan SPMB daring yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Sumber

antaranews.com, 17 dan 18 Juli 2025;
detik.com, 16 dan 17 Juli 2025;
idntimes.com, 18 Juli 2025;
jawapos.com, 15 Juli 2025;
kemdikbud.go.id, 18 Maret 2025;
kompas.com, 18 Juli 2025;
medcom.id, 17 Juli 2025;
tribunnews.com, 15 dan 16 Juli 2025.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id
@pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making